



PILAR-PILAR PERADABAN PESANTREN; POTRET POTENSI DAN PERAN PESANTREN SEBAGAI PUSAT PERADABAN

Mu'ammarr¹

Abstrak

Pesantren sejak awal berdirinya hingga sekarang menjadi salah satu pusat studi Islam yang paling dipercaya umat Islam. Kegiatan pendidikan keagamaan di Pesantren dinilai komprehensif karena tidak hanya terjadi transfer of knowledge, akan tetapi *transfer of value's*; tidak hanya mendasarkan pada pemahaman teori, akan tetapi praktik ibadah sekaligus; tidak hanya mengandalkan hapalan serangkaian teori keilmuan akan tetapi membiasakan diri dalam tradisi ritual; tidak hanya secara retorik menggalakkan konsep *'adalah, tawassuth, dan tawazun*, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tataran praksis kehidupan pesantren. Pesantren mempunyai kekuatan ganda (double power) yaitu kyai sebagai pemimpin pesantren dan pesantren sendiri sebagai institusi dan sistem pendidikan. Sebagai salah satu kekayaan budaya umat Islam Indonesia yang khas, pesantren telah terbukti menjadi barometer pertahanan moralitas umat Islam dan merupakan lembaga sosial yang mampu melakukan perubahan masyarakat di lingkungannya ke arah transformasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Pilar-pilar peradaban pesantren mengejawantah melalui potensi dan peran yang dimainkan oleh pesantren dalam mempertahankan eksistensinya dan berperan aktif memanfaatkan potensinya sebagai lembaga pendidikan untuk kepentingan tafaqquh fiddin.

Kata Kunci : Pesantren, Pilar peradaban, eksistensi pesantren.

A. Pendahuluan

Secara historis, pesantren telah “mendokumentasikan” berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam Indonesia, pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia. perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara, khususnya di Jawa yang tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. Berpusat dari pesantren, perputaran roda ekonomi dan kebijakan politik Islam

¹ Muamar, STIK Kendal Jawa Tengah



dikendalikan. Di masa Walisongo, tidak sedikit wali-wali di Jawa menguasai jaringan perdagangan antara pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa, seperti Sunan Giri yang memiliki jaringan perdagangan antara Jawa dengan Kalimantan, Maluku, Lombok dan sebagainya. Begitu pula dengan perjalanan politik Islam di Jawa, pesantren mempunyai pengaruh yang kuat bagi pembentukan dan pengambilan sebagai kebijakan di keraton-keraton. Misalnya, berdirinya Kerajaan Islam Demak, adalah karena dukungan dan kontrol kuat dari para ulama, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan sebagainya. Dari situlah, dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat Islam di masa awal dapat ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara pesantren, pasar, dan keraton.²

Pada mulanya, pesantren menunjukkan suatu komunitas yang dinamis dan kosmopolit, karena berkembang di tengah-tengah masyarakat urban, seperti Surabaya (Ampel Delta), Gresik (Giri), Tuban (Sunan Bonang), Demak, Cirebon, Banten, Aceh (Sumatera), Makasar (di Sulawesi) dan sebagainya. Kedinamisan pesantren tidak hanya di bidang ekonomi dan dekatnya dengan kekuasaan, tetapi juga dalam keilmuan Islam, membuat Taufik Abdullah mencatat pesantren sebagai pusat pemikiran keagamaan.³

Kecenderungan kehidupan pesantren yang kosmopolit dan dinamis berubah setelah kedatangan penjajah Belanda. Dengan dikuasainya kota-kota perdagangan oleh Belanda membuat pesantren terdorong keluar dari kota-kota di pesisir dan masuk ke pedalaman yang menutup diri dari kehidupan “duniawi”. Setelah itu, pesantren hanya memusatkan perhatian dalam masalah-masalah agama. Semakin kuat penjajahan Belanda yang diikuti dengan upaya Westernisasi dan modernisasi, menyebabkan pesantren semakin menutup diri. Namun, pesantren tidak bisa menutup mata terhadap rakyat. Sejak masa kolonial Belanda, pesantren telah memberikan kontribusi yang besar dalam mengusir penjajah dari tanah air.⁴

Motivasi politik melawan kaum kolonial yang ditunjukkan oleh pesantren misalnya terwujud dalam resolusi Jihad oleh KH. Hasyim Asyari. Kalangan pesantren dengan semangat jihad yang tinggi ikut serta memainkan peran politik penting dalam waktu itu. Gelora jihad oleh KH. Hasyim Asyari ini merupakan manifestasi tertinggi dari kesadaran dan harga diri di kalangan komunitas pesantren.⁵

² Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalimah, 1999) hlm. 183

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 50



Dari deskripsi di atas, pesantren memainkan peranan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam konteks inilah pesantren mempunyai pilar-pilar peradaban yang akan membangun peradaban di nusantara. Berbagai bidang tersebut selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut, yang meliputi bidang keilmuan, bidang sosial budaya, bidang ekonomi kerakyatan, dan bidang politik-kebangsaan.

B. Pilar Peradaban Pesantren: Keilmuan dan Tradisi Pesantren

Pesantren sejak awal berdirinya hingga sekarang menjadi salah satu pusat studi Islam yang paling dipercaya umat Islam. Kegiatan pendidikan keagamaan di Pesantren dinilai komprehensif karena tidak hanya terjadi transfer of knowledge, akan tetapi *transfer of value's*; tidak hanya mendasarkan pada pemahaman teori, akan tetapi praktik ibadah sekaligus; tidak hanya mengandalkan hapalan serangkaian teori keilmuan akan tetapi membiasakan diri dalam tradisi ritual; tidak hanya secara retorik menggalakkan konsep *'adalah*, *tawassuth*, dan *tawazun*, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tataran praksis kehidupan pesantren. Bisa dikatakan bahwa pesantren merupakan miniatur masyarakat Islam ideal yang jika pengaruhnya sampai pada spektrum yang lebih luas tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sesuai dengan kehidupan pesantren itu sendiri.

Masyarakat di sekitar pesantren cenderung mengikuti pola kehidupan pesantren. Sebaran alumni pesantren di berbagai belahan nusantara cenderung berperilaku sesuai dengan tradisi pesantren di mana dulu ia menimba ilmu, dan ia akan berusaha menrapkan tradisi keilmuan dan ibadah, tata nilai dalam masyarakat di mana ia tinggal.

Basis keilmuan pesantren yang utama adalah kitab kuning sehingga pemikiran para ulama yang ada di dalamnya bisa digali, dipahami, diamalkan dan dilestarikan secara kontinyu dari generasi ke generasi. Proses mata rantai keilmuan pesantren melalui kitab kuning ini menciptakan tradisi yang unik, yakni konsep ijazah/sanad yang *muttashil* (menyambung) dari ulama pesantren yang mengajarkannya sampai kepada *mu'allif* (pengarang) kitab tersebut. Transmisi keilmuan semacam inilah yang menjadi keunggulan pesantren sehingga bisa dinilai bahwa kemurnian keilmuan pesantren bisa dijaga dan ditelusuri sampai kepada *mu'allif*. Dari *mu'allif* ini kemudian bisa ditelusuri mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah Muhammad saw. Melalui sejumlah kitab riwayat para imam/para ulama dapat diketahui sejumlah riwayat



para ulama pengarang kitab tersebut. Hal ini semakin menguatkan keyakinan kebenaran transmisi keilmuan pesantren.

Tradisi sanad ini memang unik dan menjadi ciri khas pesantren. Geneologi intelektual pesantren, sebagaimana dalam catatan Zamachsyari Dlofier dan Abdurahman Mas'ud, sangat jelas dari tertata rapi dalam dokumen-dokumen sejarah dan ingatan para ulama pesantren. Baik melalui tulisan dalam sanad, buku-buku sejarah maupun oral history yang berkembang di dunia pesantren, mereka dapat menemukan ikatan geneologi keilmuan antarpesantren yang saling kait mengkait dan bermuara pada sejumlah tokoh besar nusantara dan ulama terkemuka di haramaian, Makkah dan Madinah.

Pesantren memiliki semangat keilmuan yang tidak bisa dipungkiri. Implementasi ajaran *talabul 'ilmi* bagi masyarakat santri bukan hanya merupakan ajaran ideal Nabi tentang pendidikan seumur hidup. *life –long education*, lebih dari itu ia merupakan pilihan hidup yang harus ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari para santri tanpa henti. *Talabul'ilmi* dengan demikian, merupakan misi utama kaum santri yang sangat mewarnai budaya pesantren sehingga lahirnya santri-santri kelana, wandering santris, di masa lampau. *Talabul'ilmi* dalam tradisi pesantren, yang tidak berbeda dengan tradisi keilmuan di pusat dunia Islam, sungguh memiliki justifikasi keagamaan dan kesejahteraan yang cukup mengakar. Dengan kata lain, budaya *talabul'ilmi* dalam dunia pesantren telah menyejarah, melembaga, dan menjadi bagian dari ideologi.

Masyarakat luas, khususnya masyarakat tradisional, telah menyaksikan dan ikut menikmati budaya *talabul'ilmi* dari pesantren-pesanten salaf. Ini adalah model pendidikan yang terjangkau oleh setiap penduduk, termasuk oleh warga negara yang serba berkekurangan sekalipun. Masyarakat juga menikmati lahirnya alumni-alumni pesantren salaf yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin informal, kharismatik di tengah-tengah mereka dengan kelebihan ilmu agama dan moralitas agama pesantren. Integrasi pesantren dengan masyarakat ini sungguh telah mengakar dan membudidaya dari dulu sampai sekarang. Ini adalah bagian dari wujud konklusi selama ini, *the pesantren's tradition has a historical and ideological continuum*.⁶

Jika pada pesantren salaf orientasi keilmuan terbatas pada ilmu-ilmu agama, pada pesantren modern, budaya keilmuan berjalan seiring dengan kebutuhan modernitas, tetapi tetap didasari ruh Islamiyah. Ilmu-ilmu umum atau

⁶ Abdurrahman Mas'ud, Menuju Paradigma Islam Humanis, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 243



sekuler dikenalkan kepada santri justru untuk memperkaya dan memperluas cakrawala berpikir mereka. Bahasa asing khususnya bahasa Inggris, yang dijadikan bahasa kedua setelah bahasa Arab, menghabsahkan label modern pada pesantren yang menamakan diri pesantren modern seperti pesantren Modern Gontor, Pesantren Assalam, Pesantren Darun Najah, dan sebagainya.⁷

Pada pesantren semi modern, diajarkan pengetahuan agama yang bersumber dari kitab kuning dipadu dengan ilmu pengetahuan dari lembaga sekolah formal baik di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan pola ini, out put pesantren diharapkan bisa membekali diri dengan keilmuan agama sekaligus mampu berkompetisi dalam era global sekaligus melahirkan karya nyata. Di samping itu, sejumlah program yang dirancang Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah juga mendukung upaya mulia ini. Dengan memberikan beasiswa bagi santri berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi diharapkan mampu melahirkan santri yang handal dan ideal. Dengan demikian, peradaban masyarakat muslim diharapkan akan lahir dari santri-santri yang berprestasi, berakhlak, dan memiliki basic keilmuan keagamaan yang mumpuni.

Besarnya harapan lahirnya peradaban dari rahim dunia pesantren sebenarnya tidak lepas dari sistem pendidikan pesantren yang menerapkan ketiga aspek pendidikan, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Para santri selain hidup dalam situasi sosial dan kekeluargaan selama dua puluh empat jam, siang dan malam, secara terus menerus juga senantiasa dalam suasana pendidikan di bawah bimbingan langsung kyai atau para ustadz.⁸

Dari deskripsi di atas, potensi dan peran pesantren dalam pelestarian dan pengembangan studi keislaman akan terus mengejawantah dan membentuk manusia berpengathuan, terampil, berakhlak mulia, kreatif, dan senantiasa memperdalam keilmuan dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Dari sinilah, keilmuan pesantren akan membentuk masyarakat muslim yang berpengetahuan dan shaleh. Di samping itu, sejumlah alumni pesantren akan menghasilkan karya-karya berkualitas yang merupakan perpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan agama, kecerdasan spiritual, dan pancaran semangat jihad f isa bilillah lil maslahtil ummah.

⁷ Ibid., hlm. 244

⁸ Team Direktoral Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), 2003, hlm. 26



C. Pilar Peradaban Pesantren: Potensi dan Peran Pesantren dalam Aspek Sosial-Budaya

Pesantren mempunyai kekuatan ganda (*double power*) yaitu kyai sebagai pemimpin pesantren dan pesantren sendiri sebagai institusi dan sistem pendidikan. Menurut Horikhosi, sebagaimana dikutip Edi Supriyono, yang mengakari kekuatan kyai atau ulama adalah kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan. Tidak semua fungsionaris Islam adalah ulama yang mempunyai kedudukan, wibawa, dan pengaruh yang sama. Gelar ulama atau kyai diberikan oleh masyarakat muslim karena ke'aliman dan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.⁹ Sedangkan pesantren sebagai institusi pendidikan agama, merupakan sebuah lembaga yang representatif dalam mengembangkan ajaran Islam dan mengkonstruksi budaya masyarakat yang melingkupinya.

Ulama sebagai elit santri adalah orang yang memiliki status sosial dengan kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Islam. Berbagai keputusan tindakan anggota masyarakat seringkali diserahkan dan lebih banyak ditentukan oleh ulama sebagai referensi tindakan sosial. Karena itu, sikap dan tindakan umat sebagai lapisan bawah dalam struktur masyarakat Islam adalah fungsi dari sikap dan tindakan ulama.¹⁰

Struktur hubungan sosial antara elit santri dengan umat muncul dan tumbuh dari proses hubungan berdasarkan pengalaman keagamaan dan emosi keagamaan. Sifat hubungan yang demikian merupakan daya perekat dan pembentuk solidaritas keagamaan sebagai infrastruktur tata kehidupan sosial umat. Proses interaksi tersebut secara tradisional terpelihara melalui kegiatan sosialisasi Islam, pengajian, dan khutbah-khutbah.¹¹

Dalam konteks sosial, tak seorang pun menyangsikan peran sosial pesantren, khususnya pesantren tradisional. Begitu juga peran kiai sebagai pemimpin sentral pesantren. Semenjak kelahirannya hingga hari ini, pesantren tetap diakui memainkan peranan penting dan berarti dalam masyarakat. Pesantren tidak saja menyediakan ruang pembelajaran yang murah dan dibutuhkan masyarakat-bawah (*grassroots society*), sehingga membentuk karakter sosial yang khas, melainkan juga menjadi "patron" yang setia bagi masyarakat dalam mengarungi proses perubahan yang terjadi.

⁹ Edi Supriyono, *Pesantren di Tengah Arus Globalisasi*, dalam *Menggagas Pesantren Masa Depan*, (Yogyakarta : Qirtas, 2003), hlm. 66.

¹⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 48

¹¹ *Ibid.*,



Adalah Hiroko Horikoshi, antropolog di bidang modernisasi dari Jepang, yang dalam penelitiannya tiga dasa warsa lalu di Garut Jawa Barat secara baik menangkap proses perubahan tersebut. Dengan menampilkan sosok Kiai Yusuf Tajri dari Cipari, ia berkesimpulan bahwa kiai berperan kreatif dalam perubahan sosial. Kiai mampu membawakan pandangan hidup tradisional ke arah modernitas hidup dengan watak emansipatoris.¹² Dengan kekuatan “kharisma” dan pikatan keagamaannya, kiai lewat lembaga pesantrennya tidak saja melayani pendidikan rakyat, dakwah keagamaan, pendampingan dan pembelaan pada kaum yang tertindas, tetapi juga menjadi pemain politik (political actor) yang cantik di atas panggung kekuasaan. Kiai dalam penjelasan demikian adalah pribadi yang kompleks, tidak saja bergelut pada wilayah keagamaan karena ahli agama, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi sosial lain sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Dari sinilah pesantren menampilkan satu budaya khas yang berkarakter. Tiga karakter dasar pesantren, yakni keilmuan, modeling (uswah khasanah), dan mempertahankan tradisi, tampak jelas pada masing-masing pesantren. Subtansi budaya pesantren yang tampak dalam tiga aspek itu tetap sama, meskipun manifestasinya beragam.¹³

Sebagai salah satu kekayaan budaya umat Islam Indonesia yang khas, pesantren telah terbukti menjadi barometer pertahanan moralitas umat Islam dan merupakan lembaga sosial yang mampu melakukan perubahan masyarakat di lingkungannya ke arah transformasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Pesantren juga merupakan lembaga yang mengerti perubahan dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia.¹⁴

Termasuk budaya keilmuan pesantren salaf adalah orientasi pembelajaran yang lebih menekankan pendidikan dari profesionalisme pengajaran. Karena kecenderungan pembentukan watak yang diutamakan ini, sering institusi pendidikan yang ada berjalan dengan kesederhanaan dan fleksibilitas yang tinggi. Seiring dengan fleksibilitas ini, pengajian-pengajian informal, tahlilan,

¹²Baca sepenuhnya Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*, Disertasi Ph.D dalam bidang antropologi di University of Illinois, Urbana-Champaign, USA, 1976. Diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987). Dikutip dari Marzuki Wahid, Marzuki Wahid, “Metamorfosis Pesantren Pergulatan Tradisi-Pesantren, Kebudayaan-Lokal, dan Politik-Kekuasaan” dalam A. Mutohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 134

¹³ Abdurrahman Mas’ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Op. Cit., hlm. 242

¹⁴ Team Direktoral Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2004, hlm 2



khaul, kenduri, manaqiban, dan pengajian tariqah sangat mewarnai tradisi pesantren. Disadari atau tidak, beberapa tradisi ini ternyata telah membentuk budaya nasional, yakni Indonesia yang sarat dengan ritual dan seremoni keagamaan. Dengan kekayaan percaya keagamaan dari tingkat daerah sampai nasional, Indonesia telah membedakan diri dengan negara-negara lain yang berpenduduk mayoritas muslim.¹⁵

Pada acara-acara informal yang diselenggarakan pesantren menjadi media sosialisasi kyai dengan umat. Karenanya, sungguh pun kyai menjadi bagian dari lapisan elitisme sosial-keagamaan, namun etos populisme dan kedekatannya dengan masyarakat bawah (grassroot society) sampai saat ini belum dapat diungguli oleh lembaga yang berlabelkan 'rakyat' atau 'masyarakat' sekalipun. Kedekatan ini bisa dilihat, paling tidak, tatkala pesantren mempunyai hajat, misalnya menyelenggarakan acara Haul seorang Kyai pengasuh pesantren, atau istighâsah. Hingga sekarang, pada acara seperti itu --yang diadakan setiap tahun-- pesantren tetap tergolong nomor wâhid dalam hal penyerapan massa, sebagai bukti kedekatannya dengan masyarakat bawah. Dalam acara haul atau istighatsah, ratusan ribu warga nahdliyin hadir dengan tertib dan taat, mengikuti aturan yang diberikan dan perintah Kyai. Walaupun pada sisi lain juga harus diakui bahwa dalam beberapa hal fungsi sosio-kultural pesantren untuk masyarakat, dewasa ini, berkurang. Akan tetapi, hal ini lebih diakibatkan oleh pemaksaan modernitas: spesialisasi dan profesionalisasi, sehingga memaksa beberapa peran-sosial (social roles) kyai tereduksi.¹⁶

Di samping itu, tradisi kesederhaan, kemandirian, etos belajar yang tinggi, sikap tasamuh, ta wazun, dan ta wasuth juga berhasil dilahirkan dari rahim pesantren sehingga kehidupan masyarakat muslim nusantara identik dengan kedamaian, toleransi, tegaknya nilai-nilai keadilan, dan moderasi. Ketiga sikap tersebut kemudian melembaga sebagai ciri khas masyarakat muslim nusantara, sehingga muslim Indonesia dinilai santun, penuh kedamian, toleran, dan moderat.

Sikap kesederhanaan santri membentuk masyarakat yang tidak serakah dan hanya mau menikmati rizki yang halal dan berkah. Sikap dan keyakinan ini melahirkan budaya kerja yang positif karena kehalalan dan keberkahan menjadi acuan utama. Dengan sikap ini, budaya korupsi sebenarnya bisa diminimalisir.

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud, Menuju Paradigma Islam Humanis, Op. Cit., hlm. 244

¹⁶ Marzuki Wahid, "Metamorfosis Pesantren Pergulatan Tradisi-Pesantren, Kebudayaan-Lokal, dan Politik-Kekuasaan" dalam A. Mutohar, Ideologi Pendidikan Pesantren, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007



Meski demikian, stereotype keberagaman santri yang penuh kesederhanaan ini tidak lepas dari sikap serba pasrah kepada takdir yang dinilai sebagian kalangan justru kontraproduktif dengan kemajuan dan peningkatan etos kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun penilaian ini tidak sepenuhnya benar. Mengingat jika ditelisik lebih jauh sikap pasrah (baca: tawakkal) yang tinggi dari dunia pesantren harus dimaknai sebagai sikap pasrah setelah adanya ikhtiar. Ajaran “tangan di atas lebih mulai dari tangan di bawah” (yad al-‘ulya khairun min yad al-sufila) menjadikan dasar semangat budaya kerja yang beretos tinggi.¹⁷

Adapun budaya toleransi dan menghargai perbedaan yang tinggi merupakan manifestasi dari ajaran Sunni tidak lepas dari pendidikan pesantren. Santri sejak awal dibekali dengan keberagaman yang toleran sehingga di tengah masyarakatnya mampu menyebarkan budaya damai. Budaya damai pesantren inilah yang harus ditumbuhkembangkan untuk menangkan radikalisme agama yang melahirkan terorisme. Dalam halaqah nasional tentang “Budaya Damai Pesantren” yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama beberapa bulan yang lalu menunjukkan bahwa pesantren menyimpan potensi luar biasa serta mampu berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan, radikalisme agama, dan terorisme dapat dicegah dari budaya damai pesantren yang selama ini terbukti mengakar kuat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

D. Pilar Peradaban Pesantren: Peran dan Potensi Pesantren dalam Ranah Politik Kebangsaan

Masyarakat Islam tradisional-paternalistik di Indonesia memahami kyai sebagai pribadi yang memiliki kedudukan khusus. Realisasi kekhususan itu sesungguhnya karena mereka merupakan figur sentral yang dihormati. Apresiasi ini yang terkait otoritas kyai dalam agama, etika dan fungsi spiritualnya, yaitu sebagai penjaga keharmonisan umat. Sampai kini, bagi para masyarakat tertentu di desa maupun kota, masih memandang kiai sebagai individu yang mampu

¹⁷ Penting juga dikemukakan di sini hasil analisis Snouck Hurgronje, tiga dasa warsa lalu, mengenai keberadaan kaum yang sering disebut tradisional. Dia mencatat bahwa: “Islam tradisional Jawa, oleh sebagian kalangan, dianggap demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya tidak. Mereka telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental, tetapi perubahan-perubahan tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang rumit dan tersimpan. Lantaran itulah, para pengamat yang kurang mengenal pola pikiran Islam tradisional tidak bisa melihat perubahan-perubahan tersebut, walaupun sebenarnya hal itu terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama.” Dikutip dari Marzuki Wahid, *ibid.*, hlm. 132



memberi alternatif pemecahan beragam persoalan yang musykil, mulai dari problematika rumah tangga sampai 'restu' jabatan politik. Kelebihan seperti ini membuat masyarakat memposisikan kyai dalam kedudukan sosial dan spiritual yang begitu strategis. Sebab dalam kehidupan keseharian mereka menjadi marja (rujukan). Sebagai penjaga agama, kyai merupakan figur panutan umat dalam menjalankan syariat sehari-hari. Agama bagi masyarakat tradisional adalah apa yang diajarkan, dilaksanakan, dan diteladankan oleh para kyai/ ulama.¹⁸

Posisi dan peran kyai tersebut berimbas juga pada aspek politik, di mana dalam sejarahnya hingga sekarang, dunia pesantren tidak bisa terlepas dari aspek politik. Yang membedakannya adalah sejauh mana keterlibatannya dalam perpolitikan. Sejumlah kyai pesantren terjun langsung ke dalam politik praktis dan sebagainya lainnya tidak. Namun demikian, bagi kyai pesantren yang tidak terjun langsung dalam politik praktis, mereka tetap memberikan pendidikan politik.

Dalam realitas politik, jika pesantren masuk dalam lingkup struktural, maka harapan yang ingin dicapai adalah ikut andil dalam merumuskan kebijakan atau mewarnai nuansa politik/kekuasaan. Karenanya, pesantren sebagai salah satu kelompok kepentingan tidak bisa secara total menjauh dari keterlibatan dalam politik. Kelompok kepentingan keagamaan seperti pesantren pada umumnya berada pada titik moderat antara totally unpolitized dan totally politicized (Rozikin Daman, 2001: 173).

Keterlibatan pesantren dalam politik praktis tidak lepas dari konsep politik pesantren yang lebih cenderung menganut pemikiran al-Ghazali dan al-Mawardi. Kecenderungan ini meniscayakan pesantren harus ikut dalam kancah politik, baik secara kultural maupun struktural. Kaidah yang umumnya dipegangi adalah nizam al-dunya syart li nizam al-diny (adanya tertib sosial politik menjadi pra syarat terwujudnya tertib agama).

Kaidah yang juga sering dipakai untuk ikut serta dalam kancah politik adalah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajibun* (sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib); *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (apa yang tidak bisa diraih keseluruhan maka jangan ditinggal semuanya); *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan-kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan); dan *idza ta'aaradla dhararani ru'iya a'dzahuma dlarran bi al-irtikabi akhaffihima* (jika ada dua kemadlaratan

¹⁸ Abdul Latif Bustami, *Kiai Politik; Politik Kiai*, (Malang: Pustaka Bayan, 2009), hlm. 18



bertemu, maka dipilih yang paling ringan kemadlaratannya); dan tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bl al-mashlahah (kebijakan pemimpin harus mempertimbangkan/bertalian erat dengan kemaslahatan rakyat).

Karenanya, pesantren yang melibatkan diri dalam politik praktis, mempunyai alasan kuat. Menurut Abdul Munir Mulkhan, makna politik santri kaitannya dengan ide dan gagasan perjuangan Islam harus dilihat dari fungsi sosial pemikiran dan tindakan mereka menciptakan dan mengembangkan peluang terciptanya kondisi sosial dan budaya dalam merealisasikan nilai-nilai yang diduga bersumber pada ajaran Islam.¹⁹ Senada dengan Mulkhan, Abdul Latief memaparkan bahwa keterlibatan kyai dalam politik adalah agar bisa mengendalikan institusi politik yang ada untuk dijadikan kendaraan, bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan meraih jabatan formal dan kebijakan politik melainkan untuk memperjuangkan Islam tradisional.²⁰

Keterlibatan kyai pesantren dalam politik, tentu saja melibatkan masyarakat pesantren baik ustadz, santri, alumni, wali santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini karena kyai pesantren memang mempunyai 'kekuasaan'.

Kekuasaan kyai tersebut bukanlah semata-mata kekuasaan politik, melainkan kemampuan untuk menstruktur tindakan orang lain dalam bidang tertentu dan senantiasa beredar dari subyek yang satu ke yang lain sehingga menciptakan medan kharisma. Distribusi kekuasaan itu metrepresentasikan adanya jaringan kekuasaan politik dan dukungan kekuatan politik. Jaringan itu hadir dalam organisasi politik formal, kuasa formal dan informal yang kesemuanya berhubungan secara multipleks.

Bagi kyai pesantren yang terjun langsung dalam politik praktis ada kalanya 'pamornya' naik turun. Hal ini tidak lepas dari proscs-proses politik yang mengitarinya. Adanya dugaan money politik, orientasi kekuasaan dan kekayaan dinilai sebagian masyarakat mulai merambah ke dunia kyai pesantren yang terlibat dalam politik praktis. Hal ini indikasinya terlihat dalam Pemilu 2009, di mana pilihan politik kyai pesantren belum tentu diikuti oleh umat. Umat seakan memilah bahwa dalam hal spiritualitas dan pendidikan agama mereka *sami'na wa atha'na* kepada kyai. Adapun dalam masalah pilihan politik, mereka tidak merasa berkewajiban mengikuti pilihan kyai. Apalagi jika politik dipahami

¹⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Sipress, 1994), hlm. 51

²⁰ Abdul Latif Bustami, *Op. Cit.*, hlm. 18



urusan keduniaan (baca: terkait pemerintahan) yang tidak lagi menjadi wilayah kyai untuk mengarahkannya.

Nampaknya hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan kehidupan masyarakat, yang secara berangsur dan bertahap mengakibatkan pergeseran fungsi ulama dalam proses sosial Islam. Hubungan masyarakat dan kyai pesantren dalam ukuran tertentu lebih bersifat fungsional. Menurut Abdul Munir Mul Khan, pergeseran fungsi ulama juga diakibatkan oleh kenyataan bahwa pengetahuan tentang Islam, ternyata tidak hanya diperoleh melalui gerakan sosialisasi Islam tradisional yang dilakukan oleh para ulama (kyai pesantren). Sejumlah media lain sekarang menjadi referensi pengetahuan keislaman, sehingga dalam tingkat tertentu, hubungan emosi keagamaan di antara mereka mulai terbuka dan mencair, bersifat rasional, dan fungsional.²¹ Namun demikian, posisi dan fungsi kyai pesantren tetap sentral dan memegang posisi tertinggi dalam struktur masyarakat muslim Indonesia.

Di samping itu, proses politik yang di dalamnya terjadi ‘perebutan kekuasaan’ dan konflik ikut mempengaruhi citra kyai pesantren. Menurut Bailey, sebagaimana dikutip Abdul Latif Hasyim, menyatakan bahwa proses-proses politik pada dasarnya adalah persaingan antara dua kelompok atau lebih untuk memperebutkan posisi atau kekuasaan penentu dalam kebijakan umum mengenai penguasaan alokasi, pendistribusian dari sumber-sumber daya yang terbatas.²² Tidak jarang persaingan politik praktis yang ikut melibatkan kyai pesantren menjadikan citra mereka di mata umat menurun. Kyai pesantren yang secara fungsional, dari sisi politik praktis, tidak seiring dengan pilihan sekelompok masyarakat tertentu, maka ia akan ditinggalkan. Santri, khususnya yang sudah mukim di tengah masyarakat, merasa tidak harus ‘menagamatkan’ kebijakan kyainya jika ia berada di tengah masyarakat yang secara politik berbeda dengan pilihan politik kyainya. Berdasarkan pendekatan fungsional tersebut, menurut Mul Khan, dapat diduga bahwa perilaku politik santri bersifat kondisional. Karena itu, perilaku politik santri akan dapat berubah sejalan dengan perubahan kondisi sosial dan politik yang sedang berkembang.²³

Jika ditelisik dari akar tradisi dan ajaran pesantren, perubahan pemikiran dan sikap (baca: pilihan) politik pesantren sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Perubahan yang ada tidak lepas dari tinjauan fiqih. Kaidah yang sering dipakai adalah: *taghayyur al-ahkam bi taghaur al-amkan wa al-azman*

²¹ Abdul Munir Mul Khan, *Op. Cit.*, hlm. 48

²² Abdul Latif Bustami, *Op. Cit.*, hlm. 18

²³ Abdul Munir Mul Khan, *Op. Cit.*, hlm. 51



(berubahnya hukum terkait erat dengan perubahan waktu dan tempat); al-hukmu *yaduuru ma'a illatihi wujudan wa adaman* (hukum tergantung pada ada tidak adanya 'illat); dan al-*mukhafadlatu 'ala* qadim as-shalih wa al-akhdlu bi al-jadid al-ashlah (memeliharakan hal-hal terdahulu yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).

Berbagai kaidah fihiyyah di atas menyebabkan para kyai pesantren cenderung fleksibel dalam merespons situasi perpolitikan nasional. Karenanya antar kyai pesantren seringkali berbeda pandangan dan afiliasi politiknya. Bahkan dalam satu lokasi pesantren, antar pengasuh berbeda sikap dan afiliasi politiknya. Inilah yang terkadang menjadi sumber masalah kaitannya dengan 'kiblat' politik umat. Pada akhirnya terjadi distorsi 'ketaatan' politik; terjadi polarisasi dukungan; dan untuk sementara memanaskan suhu perpolitikan dalam internal pesantren.

Namun demikian, perubahan di atas adalah perubahan pilihan 'baju' politik. Hampir semua kalangan pesantren sepakat, bahwa baju politik boleh berubah dan berbeda. Sementara prinsip-prinsip dasar politik Sunni yang menjadi ruh dunia pesantren tidak boleh berubah. Spirit dan pendidikan politik yang ada dalam tradisi pesantren inilah yang akan melahirkan pilar peradaban dalam ranah politik kenegaraan.

Beberapa spirit dan ruh politik pesantren yang sudah mentradisi dan dikembangkan selama ini adalah: pertama, hubbul wathan (cinta tanah air/nasionalisme). Konsekuensi dari pemikiran ini adalah kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Kedua, nashbul imamah (mendirikan kepemimpinan). Konsekuensinya adalah keikutsertaan dalam proses-proses politik yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya partisipasi politik dalam pemilu. Ketiga, mentaati ulil amri. Konsekuensinya adalah ketaatan pada pemerintah selama tidak menyalahi syari'at. Keempat, *amar ma'ruf nahi munkar*, di antara konsekuensinya adalah kemauan untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Karena tanpa terlibat di dalamnya kurang bisa efektif, misal menjadi anggota legislatif. Kelima, prinsip musyawarah sehingga pesantren mendukung adanya demokrasi yang dinilai sebagai implementasi konsep musyawarah. Dari konsep demokrasi inilah lahir sistem politik sebagaimana dikenal saat ini di Indonesia.

E. Pilar Peradaban Pesantren: Peran dan Potensi Pesantren dalam Ranah Ekonomi Kerakyatan



Disadari atau tidak, dunia pesantren selama ini telah memainkan peranan penting dalam usaha memperjuangkan dan memajukan perekonomian umat. Peran ini tentu bisa dilacak dari sejak dulu kala. Hadlratul Syeikh Hasyim Asy'ari, tatkala mendirikan pondok pesantren Tebuireng ternyata tidak lepas dari masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat waktu itu. Sebelum didirikan pondok pesantren Tebuireng, tidak jauh dari lingkungan ini ternyata ada pabrik gula raksasa milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan tahun 1853. Pada masa ini gula merupakan sumber devisa negara terpenting dan terbesar bagi penjajah. Pabrik gula ini merupakan simbol kemajuan teknologi dunia Barat dan secara langsung mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir para santri Tebuireng.

Mencermati berdirinya pesantren Tebeuireng vis a vis perusahaan asing, bukanlah tanpa makna, khayalan atau lelucon. KH. Hasyim Asy'ari tentu mempunyai alasan-alasan strategis yang tetap berhubungan dengan pemikiran keagamaan beliau. Paling tidak fenomena ini memperlihatkan kepada kita bahwa pesantren tidak boleh tunduk dengan hegemoni kekuatan asing atau penjajah, termasuk keangkuhan dan supremasi kehidupan ekonomi mereka.²⁴

Pada perkembangannya, peran pesantren dalam bidang ekonomi semakin terlihat yang di antaranya ditandai dengan berdirinya koperasi-koperasi di sejumlah pesantren. Karenanya, ketika ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi bangsa di era reformasi ini, peran pesantren tentu makin dioptimalkan. Yang tidak diharapkan adalah jika situasi ini merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat sesaat, dan lebih-lebih jika tren pendirian koperasi ini dipahami oleh sebagian komunitas pesantren sebagai ikut-ikutan.²⁵

Menurut Kajian PPIM Jakarta Tahun 1997, menunjukkan adanya tiga tipe kelembagaan pesantren. Pertama, pendidikan keagamaan (tafaqquh fid ddin). Pesantren tipe ini hanya melaksanakan pendidikan ilmu-ilmu keagamaan kepada santrinya. Pendirian pesantren tersebut memang didorong oleh motivasi penyebaran dan reproduksi khazanah keagamaan. Kedua, tipe pesantren gerakan sosial-ekonomi. Pesantren ini sejak awal didesain sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ekonomi keagamaan. Pesantren seperti tidak hanya menginginkan santrinya mahir dalam kitab kuning, tetapi juga berkiprah dalam sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, tipe pesantren konvergensi pendidikan agama dan gerakan sosial ekonomi. Tafaquh fid ddin telah dimaknai

²⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 235-236

²⁵ *Ibid.*, hlm. 238



sedemikian rupa sehingga keberhasilan pesantren diukur pada sejauhmana santri-santri menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan mampu berkiprah dalam gerakan sosial ekonomi.

Sejumlah pesantren memberikan pendidikan kepada para santrinya tentang ketrampilan (vocational) dan materi entrepreneurship. Pesantren ini selain memberi perhatian penuh dalam proses pendalaman dan penguasaan agama, juga memiliki sentra-sentra usaha dan melibatkan santri-santrinya dalam usaha kekayaan atau skill. Tujuan kekayaan usaha ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren, juga untuk memberikan bekal kepada para santri tentang keahlian atau skill agar setelah lulus dari pondok mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri secara ekonomi.²⁶

Menurut data dari Education Management Information system, dari sejumlah 14067 pesantren di Indonesia itu terdapat sejumlah pesantren yang dapat dikategorikan sebagai pesantren yang telah mengembangkan atau berciri khas ketrampilan. Dari sejumlah itu, sebanyak 1529 pesantren mengembangkan pertanian dan agribisnis, 404 pesantren mengembangkan ketrampilan perindustrian, 111 mengembangkan bidang perdagangan, dan 41 pesantren mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.²⁷

Di antara bentuk kekayaan tersebut ada yang mengarah pada penciptaan usaha dan peningkatan produksi bagi keberlangsungan pondok dan ada pula yang secara khusus ditujukan bagi pengembangan keahlian ketrampilan santri-santrinya antara lain agribisnis, perkebunan, ketrampilan, home industri, perikanan, jasa angkutan, perikanan, pertanian, peternakan, konveksi busana, ritel dan lain-lain.²⁸

Aspek ekonomi yang tertulis dalam kitab kuning yang merupakan rujukan pesantren mengajarkan bahwa kekayaan materi dicari sebagai sarana untuk menopang hidup, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup sejati yang harus dikejar dengan memanfaatkan kekayaan, adalah ridla Allah. Dengan demikian, apabila di dalam kitab kuning terdapat pembahasan tentang aktivitas manusia dalam bidang sosial ekonomi, maka sasaran pembahasannya buka mengenai cara bagaimana seseorang dengan usaha yang dilakukan dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana usaha itu dilakukan dengan benar, jujur, tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Rizki yang halal dan

²⁶ Team Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 15

²⁷ *Ibid.*, hlm. 16

²⁸ *Ibid.*,



berkah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah adalah buah langsung yang dipetik dari hasil usaha kaum santri.²⁹

Kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia pesantren dewasa ini sudah seharusnya diarahkan pada langkah-langkah strategis ke depan dengan landasan historis dan ideologis yang jelas. Modal utama pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pesantren bukanlah modal dari atas (top down), melainkan lebih mengutamakan potensi dan kekuatan dari dalam. Segala sesuatu yang semata-mata menyadari bantuan dari atas, senantiasa semu dan sesaat. Pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa *development from within* (membangun dari dalam) selalu melahirkan partisipasi dinamis dan langgeng dari umat yang bergerak dan berkembang secara alami karena didasari motivasi intrinsik.

Karenanya tidak mengherankan, sejumlah pesantren yang kegiatan ekonominya didasari pada motivasi intrinsik mampu eksis dan semakin berkembang pesat. Sejumlah potensi ekonomi pesantren yang diteliti oleh Team Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyyah menunjukkan bahwa dari 6 (enam) pesantren yang diteliti berhasil mengembangkan ketrampilan dan ekonomi. Keenam pesantren tersebut adalah Pesantren Sidogiri Pasuruan, Al-Amin Prenduan, Darussalam Gontor, Al-Ittifaq Bandung, Darussalam Garut, dan Arrisalah Ciamis. Ketrampilan dan ekonomi dalam yang telah dikembangkan, meliputi kopontren, perdagangan, industri dan jasa, agribisnis, perkebunan dan industri, kelautan dan perikanan.

Dari temuan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa dunia pesantren mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan sistem ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Abdurrahman Mas'ud bahwa *prime mover* (penggerak utama) pemberdayaan ekonomi umat, termasuk di dalamnya yang dilakukan pesantren, tidak diragukan lagi adalah Islam itu sendiri sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sebagai agama yang membebaskan, memanusiakan manusia, mendewasakan, mencerahkan, dan memberdayakan kaum yang tidak berdaya atau kaum lemah. *Liberation, empowerment, and intellectualization* yang mengarah pada kecenderungan melekdan kritis pada masyarakat adalah langkah-langkah pemberdayaan yang memiliki rujukan siratunnabi. Meskipun sebagai pemimpin negara Madinah, perhatian Nabi Muhammad dan

²⁹ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, Op. Cit., hlm. 238



keperpihakannya pada kaum lemah demikian transparan sehingga sikap ini dalam satu segi nampak sebagai sebuah ideologi.³⁰

Dengan potensi dan peran pesantren yang begitu besar, maka pilar-pilar peradaban Islam dalam aspek ekonomi bisa terwujud. Implementasi dari fiqh al-iqtishadiyah (hukum ekonomi Islam) ala pesantren ini menjadi barometer pemahaman kalangan pesantren terhadap rumusan fiqh sekaligus implementasinya dalam realitas perekonomian di tengah masyarakatnya. Last but not the least, nilai etika religius yang senantiasa mendasari aktivitas perekonomian di dunia pesantren menjadi tipikal masyarakat. Islam bisa ditunjukkan dalam spirit yang terkandung di dalamnya sebagai prime mover ekonomi sekaligus sebagai pengendalinya.

Deskripsi tentang pilar-pilar peradaban pesantren di atas, menunjukkan bahwa pesantren tetap memainkan peranan penting yang menyejarah dalam sepanjang perjalanannya. Hal ini harus terus ditingkatkan dengan upaya dari berbagai pihak. Pesantren terus dituntut dapat mengembangkan peran dan fungsinya dalam transformasi sosial. Karenanya, Kementerian Agama merumuskan lima peranan pondok pesantren sebagai berikut: (a) pesantren berperan sebagai instrumental dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. (b) peranan mobilisasi sosial; (c) peranan peningkatan sumber daya manusia; (d) sebagai agent of development, maksudnya adalah sebagai agen perubahan sosial dan melakukan pembebasan masyarakat yang tertindas; (e) sebagai center of excellence, yakni sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, dan pengembangan masyarakat.³¹

Transformasi sosial terus menuntut penyesuaian dari pesantren, sehingga dalam beberapa hal harus melakukan perubahan. Meskipun demikian, sejumlah pesantren mengalami hambatan melakukan perubahan sehingga ia tidak bisa berkiprah lebih lanjut dalam pembentukan peradaban umat. Menurut Nurcholis Madjid, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan perubahan pesantren, yakni: pertama, perubahan pesantren harus dimulai dari dalam, karena tidak ada yang dapat memimpin perubahan pesantren kecuali "orang dalam". Kedua, agar gagasan-gagasan baru itu diterima, diperlukan kepemimpinan yang legitimate, sah menurut ukuran-ukuran pesantren. Ketiga, perubahan yang terjadi hendaknya tidak bersifat radikal-revolusioner. Keempat, perubahan pesantren tidak hanya bermodal kharisma, tetapi juga memerlukan skill dan keahlian.

³⁰ Ibid., hlm. 239

³¹ Ruhman Basori, *The Founding Father Pesantren Modern di Indonesia*, (Jakarta: iNeis, 2006), hlm. 41-42



Kelima, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program, maka perlu disusun skala prioritas terutama pada program perombakan kurikulum pesantren.³²

Sedangkan menurut KH. Said Aqil Siradj ada tiga kekurangan pesantren jika ingin menjadi lembaga alternatif. Pertama, pesantren harus melepaskan diri dari kesan dan citra kerajaan kecil. Artinya dalam pesantren harus ditumbuhkan keterbukaan, kebebasan berfikir dan berpendapat, kemandirian, kolektivitas, dan menerima secara ofensif berbagai gagasan pembaharuan dari luar. Kedua, independensi dan otonomi pesantren yang selama ini ada perlu diperkuat dan diarahkan sebagai basis dan pemberdayaan serta penguatan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara. Ketiga, kurikulum pesantren harus dirombak. Metodologi pemikiran harus menjadi fokus utama. Santri harus dikembalikan kepada literatur (literatur as central of science). Personifikasi ilmu kepada kyai atau guru harus dikurangi melalui metode dialogis, kritis untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Karena itu perpustakaan yang memadai menjadi keniscayaan dalam pembaharuan. Pelajaran-pelajaran filsafat, logika, estetika, sejarah, sosiologi, antropologi dan sebagainya, sudah harus dipertimbangkan menjadi kurikulum pesantren.³³

Gagasan pembaharuan di dunia pesantren oleh Nurcholis Madjid dan KH. Said Aqil Siradj tersebut hendaknya menjadi bahan intropeksis pesantren untuk menatap masa depannya. Kedua intelektual kenamaan yang lahir dari pesantren tersebut tentu mengharapkan pesantren tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga tafaqquh fiddin yang tetap dipercaya umat sekaligus alumninya mampu mengkreasikan karya nyata sesuai dengan konteks zamannya. Dengan demikian, pesantren akan tetap eksis dan menjadi pusat peradaban muslim nusantara, dalam berbagai aspeknya, sesuai dengan ciri khas dan keunikan masing-masing pesantren.

F. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar peradaban pesantren mengejawantah melalui potensi dan peran yang dimainkan oleh pesantren. Karenanya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pesantren mampu mempertahankan eksistensinya dan berperan aktif memanfaatkan potensinya sebagai lembaga pendidikan untuk kepentingan tafaqquh fiddin. Tradisi keilmuan pesantren yang terus dijaga melahirkan

³² Ibid., hlm. 43-44

³³ Edi Supriyono, OP. Cit., hlm. 65.



- santri yang mempunyai pengetahuan keagamaan sekaligus berakhlak karimah. Pada pesantren salaf, tradisi keilmuan yang dikembangkan melahirkan santri yang mumpuni dalam penguasaan materi ilmu-ilmu keislaman dari sumber terpercaya, yakni kitab kuning yang merupakan karya ulama abad klasik skolastik. Apalagi dalam proses pendidikannya disempurnakan dengan sistem ijazah/transmisi keilmuan resmi melalui sanad yang muttashil sampai kepada *mu'allif*. Adapun pada santri pesantren semi modern akan melahirkan santri kosmopolit, yang menguasai kitab kuning sekaligus berkompenten dalam sejumlah ilmu pengetahuan yang ada di lembaga pendidikan formal. Ijazah yang didapat pun tidak hanya semata ijazah pesantren akan tetapi ijazah lembaga pendidikan formal. Sedangkan alumni pesantren modern lebih bisa melakukan akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan yang dilandasi nilai-nilai religius. Dengan demikian, potensi pesantren dalam ranah keilmuan mampu menjadi pilar perdaban muslim nusantara.
2. Pesantren dinilai sebagai lembaga pendidikan yang ideal. Karena di dalamnya tidak hanya diajarkan materi keagamaan, akan tetapi juga mempraktikkannya dalam realitas keseharian. Inilah nilai lebih pesantren yang tidak hanya mencetak ilmuwan atau orang *'alim*, tetapi juga sekaligus *'amil*. Kesadaran tinggi untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari dan dikuasai akan melahirkan hal nyata baik terkait amaliah yang membentuk kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial; baik yang menyangkut pengamalan dalam bentuk ubudiyah vertikal/mahdhah maupun ghairu mahdhah berupa perilaku dan karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, sikap tawasuth, tawazun, dan tasamuh yang diajarkan sejak dini di pesantren dan dipraktikkan dalam keseharian membentuk budaya damai pesantren dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga diharapkan bisa menandingi dan menangkal berkembangnya paham radikalisme agama di tengah masyarakat.
 3. Pesantren juga mempunyai kultur yang unik dan khas. Karenanya, pesantren dinilai menjadi sub kultur tersendiri yang mampu secara independen lepas dari kultur masyarakat di sekitarnya. Dan, sebagai lembaga pendidikan dengan kyai sebagai tokoh sentralnya, pesantren mampu mengejawantahkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pesantren bahkan mampu mengkonstruks budaya masyarakat dan terus menjaganya sehingga sejumlah budaya pesantren yang ada dalam komunitas masyarakat tetap terjaga dengan baik.



4. Pesantren mampu menjadi pusat pemikiran politik dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada umat. Pendidikan politik yang berbasis ajaran agama sehingga berpolitik tidak lepas dari faotsen politik dan nilai moral agama. Jika pun pesantren harus terlibat dalam ranah politik praktis, maka semata-mata demi menegakkan ajaran Islam melalui kekuasaan. Hal ini tidak lepas dari akar kesejarahan pesantren yang lekat dengan politik melalui hubungan antara para wali, sultan, keraton, dan rakyat. Juga di masa perjuangan melawan penjajah, pesantren terlibat sebagai oposisi pemerintah kolonial dan mengangkat senjata melakukan jihad. Gelora Resolusi Jihad oleh Rais Akbar NU, KH. Hasyim Asya'ari menunjukkan betapa pesantren terlibat aktif dalam politik. Dalam konteks kekinian konsep musyawarah, demokrasi, hubbul wathan minal iman, ketaatan kepada pemimpin, dan nashbul Imamah menjadi bagian dari prinsip pesantren demi utuhnya Negara Kesantuan Republik Indonesia.
5. Pesantren menyimpan potensi perekonomian yang jika dikelola secara baik dapat memberdayakan ekonomi umat. Apalagi dengan ditunjang ajaran dari kitab-kitab kuning yang menjadi pegangan pesantren. Dari sini pesantren akan mampu menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengentaskan umat dari kemiskinan, sekaligus menjadi uswah khasanah pengamalan fiqih al-iqtishadiyah serta berbisnis dengan dilandasi etika religius.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif Bustami, *Kiai Politik; Politik Kyai, Membaca Wacana Politik Kaum Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan, 2009
- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Darma Bhakti, 1933 H.
- Adeng Mukhtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Ajid Tohir, *Gerakan Politik Kaum Tarekat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kesetabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- David Kaplan, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Eevelin Clark, *Bagaimana Para Pemimpin Besar Menggunakan Cerita untuk Meningkatkan Kesuksesan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007
- Elis Suyono dan Samsul Munir Amin, *Biografi KH. Muntaha al-Khafidz*, Wonosobo: Unsiq Press, 2004
- Faisal Islamil, *Pijar-pijar Islam Permulaan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: LESFI, 2002
- Ganjar Nugraha Jiwa Praja, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Armico, 1981
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalimah, 1999
- Idarah Aliyah, *Thariqah Mu'tabarrah Nahdliyyah*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Irfan Hielmy, *Pesan Moral dari Pesantren*, Bandung: Nuansa, 1999
- KH. Aziz Masyhuri, *al-Fuyudhatur Rabbaniyah fi Maqarrartil Mu'tamarati wal Musyawarati li Jam'iyah Ahlith Thariqah Mu'tabarrah*, Surabaya: Khalistha, 2006



Jurnal Madaniyah Edisi VII Agustus 2014

ISSN 2086-3462

- Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS, 1995
- Masykuri Abdillah, Gelombang Demokrasi di Negara-negara Muslim, Yogyakarta: Titian Wacana, 1999.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1982
- Moch Marjuki, "Fitrah Pendidikan dalam Konteks Pendidikan Nasional" dalam Jurnal Studi Islam, Volume 04 No 01, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2004
- Mochtar Mas'ud, Negara, kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Moh Nadzir, Metode Penelitian, Jakarta: Galia Indonesia, 1996
- Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Mukhsin Jamil, Tarekat dan Dinamika Sosial Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Musytafa Kamal Pasha, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002
- Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 2000
- PK. Purwantana, Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Ramlan Surbakti, Memahani Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2007
- Ridwan Nasir, Format Pendidikan Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Rozikin Daman, Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Ruchman Basori, The Founding Father Pesantren Modern di Indonesia, Banteng: IneIS, 2006
- Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992

Saiful Huda, “Pesantren dan Proses Pembangunan Bangsa”, dalam Affian Hasyim et.all, Menggagas Pesantren Masa Depan, Yogyakarta: Qirtas, 2003

Slamet Untung, Muhammad Sang Pendidik, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002

Sukarran, Suatu Studi Ilmu Politik Ideologi, Bandung: Alumni, 1981

Sulton Masyhud dan Muh Khusnurridlo, Manajemen Pondok Pesantren, Jakarta: Diva Pustaka, 2003

Sutrisno Hadi, Metode Research, Yogyakarta: UGM Press, 1986

KH. Lutfil Hakim Muslih, dkk., Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah, Mranggen: Pesantren Futuhiyyah, 2001

Yususf Qardlawi, Legalitas Politik, Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syari'ah, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Zamachsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1981.